

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Maka dari itu, pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan di Indonesia masih harus terus dilaksanakan walaupun keadaan negara sedang tidak stabil. Pembangunan ini meliputi di segala bidang aspek kehidupan yang pada hakekatnya menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia.

Hal ini sesuai dengan UU No.25 Tahun 2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan mengacu kepada RPJP Nasional.

Keberhasilan pembangunan juga tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, sehingga akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan yang akan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas menyebabkan pemerintah pusat tidak mampu untuk mengurus segala masalah yang ada pada setiap daerah. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah pusat mengambil langkah yaitu diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, yang artinya pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sedangkan bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di pelosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Sama halnya dengan pemerintah pusat, di daerah juga memerlukan pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Menurut Suranta, 2005:53 yaitu :

Penerimaan pemerintah dapat menjadi sumber untuk membiayai kegiatan pemerintahan, maka pemerintah selalu berusaha menggali sumber dana untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan pemerintahannya, salah satunya dengan mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :

Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendirinya, di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

“Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat” (Munawir, 2000:289).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting yaitu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dimana Pendapatan Asli Daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, menurut Kuncoro (2007:2), realitas menunjukkan bahwa” Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20%”.

Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Widjaja (2005) menyatakan bahwa, “Apabila pemerintah terlalu menekankan pada perolehan Pendapatan Asli Daerah, maka masyarakat akan semakin terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud pencapaian target”.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandang hidup mereka. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dimana iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi kehidupan di segala bidang. Sedangkan pengertian pendidikan itu sendiri menurut UU No.20 Tahun 2003 :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar dapat hidup dalam situasi baru yang muncul dalam diri dan lingkungannya. Bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik

pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan yang kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikan anggarannya saja.

Hal ini banyak di pertanyakan di kalangan orang tua siswa, dengan mahalnya biaya pendidikan yang terjadi di Kabupaten Klaten. Dari koordinator FPTK (Forum Perempuan Tani Klaten) mengatakan bahwa di lapangan masih banyak sekolah yang memungut biaya pendidikan dengan membebani orang tua pada saat tahun ajaran baru. Dengan alasan pembelian seragam, pengembangan dana sekolah, kenang-kenangan sekolah dan lain-lain. Di lain pihak pemerintah juga menyalurkan sebuah dana untuk menunjang biaya pendidikan tersebut. Adapun dana pemerintah yaitu Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana alokasi Khusus (DAK), dimana jumlahnya yang tidak sedikit, terus mengalir setiap tahun

dan jumlahnya selalu naik setiap tahunnya. Harusnya dengan adanya dana bantuan itu beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya semakin ringan, bukan malah sebaliknya. Banyak orang tua sulit untuk mengakses pendidikan yang berkualitas karena terhambat oleh mahalnya biaya pendidikan di sekolah tersebut. Ini adalah tugas pemerintah Kabupaten Klaten agar lebih memperhatikan masyarakatnya dalam masalah pendidikan serta dapat benar-benar merealisasikan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK REALISASI BIAYA PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN**”.

B. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah memahami permasalahan, perlu adanya pembatasan masalah. Agar tidak menyimpang dari persoalan pokok, maka pembatasan masalah terbatas pada :

1. Pendapatan pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dll) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan di Kabupaten Klaten.

2. Pendapatan Retribusi daerah (retribusi terminal, retribusi kebersihan, retribusi parkir d tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi ijin mendirikan bangunan, dll) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan di Kabupaten Klaten.
3. Pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan di Kabupaten Klaten.

C. Perumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan di Kabupaten Klaten?
2. Apakah ada pengaruh pendapatan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan di Kabupaten Klaten?
3. Apakah ada pengaruh pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan di Kabupaten Klaten?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan di Kabupaten Klaten.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan di Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan di Kabupaten Klaten.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
Sebagai masukan bagi pemerintah daerah atau instansi terkait lainnya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.
2. Bagi KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah dalam melaksanakan pajak daerah dan retribusi daerah agar hasil dari pendapatan ini tidak menyimpang sehingga dapat tersalurkan kepada rakyat.
3. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat lebih memahami seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan pada pemerintahan Kabupaten Klaten.

4. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan rujukan kepada penelitian sejenis dalam pajak daerah dan retribusi daerah dan dapat menambahkan atau memunculkan variabel lain.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika merupakan isi yang ada dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian pajak daerah, pengertian retribusi daerah, dan pengertian pendapatan asli daerah, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan untuk menyusun penelitian yang meliputi : pengertian metode penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, populasi, sampel, sampling, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA